

Nomor : B/ 105 /RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Gubernur Papua

di

Jayapura

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua di tahun 2021 adalah **56,96** atau kategori "**CC**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,65	11,96
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,62	4,31
	III. Reform	30,00	14,15	14,30
	Total Komponen Pengungkit	60,00	30,42	30,57

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,48	7,52
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,08	7,76
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,80	7,06
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,73	4,05
Total Komponen Hasil		40,00	26,09	26,39
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	56,51	56,96

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada aspek pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.

2. Terdapat 8 hasil antara perubahan Pemerintah Provinsi Papua yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Sumber Data
1.	ASN yang Profesional	0-100	26,48	Badan Kepegawaian Negara
2.	Implementasi SPBE	0-5	1,8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	67,93	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.	Maturitas SPIP	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kapabilitas APIP	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	44,72	Ombudsman Republik Indonesia
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	36,6	Arsip Nasional Republik Indonesia

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta penilaian kualitas pengelolaan arsip. Meskipun demikian, hasil penilaian ASN profesional dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Maturitas SPIP dan Kapabilitas

APIP Provinsi Papua juga masih rendah dan tidak menunjukkan peningkatan dari hasil penilaian tahun 2020. Penilaian hasil antara yang baru dilakukan pada tahun 2021 juga menunjukkan hasil yang belum terlalu baik, sehingga secara keseluruhan hasil antara Provinsi Papua pada tahun 2021 mengalami penurunan.

3. Pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2020.
4. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:
 - a. Penetapan agen perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, sehingga agen perubahan belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal;
 - b. Pemerintah Provinsi Papua belum menyusun pemetaan kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang bersifat menghambat dan tidak harmonis;
 - c. Peta proses bisnis sebagian unit kerja belum disusun dan belum dilakukan evaluasi terhadap SOP yang diterapkan sebelumnya, sehingga belum terjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja;
 - d. Pemerintah Provinsi Papua belum membangun tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan maksimal. Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Provinsi Papua yaitu 1,8 kategori kurang;
 - e. Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya melaksanakan sistem merit, salah satunya dengan melaksanakan *assessment* kepada pegawai namun hanya dilakukan kepada pimpinan perangkat daerah. Di samping itu, belum disusun kebijakan terkait manajemen talenta;
 - f. Indikator kinerja individu belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi atau unit kerja;
 - g. Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun kebijakan pengawasan, antara lain kebijakan tentang *whistle blowing system*, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan. Namun implementasi atas kebijakan pengawasan tersebut masih belum optimal;
 - h. Dalam pelayanan publik belum ada kebijakan sistem kompensasi kepada penerima layanan, bila menerima layanan tidak sesuai standar. Di samping itu, belum terlihat upaya yang maksimal dalam menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Nilai SAKIP	0-100	64,53	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	77,60	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	70,64	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	68,53	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

6. Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Pemerintah Provinsi Papua, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:
- Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, selanjutnya mengukur tingkat keberhasilannya dan mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksi/rencana tindak;
 - Memastikan seluruh kebijakan yang dikeluarkan memiliki peta keterkaitan antar kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal ataupun eksternal sehingga dari peta keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan upaya harmonisasi kebijakan;
 - Menetapkan peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal;
 - Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan Master Plan SPBE nasional;
 - Melaksanakan *asesment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN;

- f. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga mendukung kinerja organisasi atau unit kerja;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan pengawasan agar mengetahui apakah sistem pengawasan sudah baik, sehingga dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan negara;
- h. Meningkatkan maturitas SPIP dan APIP Provinsi Papua untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri.